BABI

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Sudah lebih dari 5 dasawarsa Amerika Serikat dengan Kuba memutuskan hubungan diplomatiknya. Amerika Serikat pada tahun 1961 memutuskan segala bentuk hubungan diplomatiknya dengan Kuba lantaran Kuba yang pada saat itu dipimpin oleh Fidel Castro, seorang pemimpin gerakan revolusioner Komunis yang berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Batista, Fidel Castro memutuskan untuk mengambil alih kilang minyak Amerika Serikat di Kuba yang berujung pada dijatuhkannya keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba. Alasan lain adalah, karena pihak Amerika Serikat ingin membendung pengaruh Komunisme yang meluas di Kuba sebagai hasil dari kedekatan pemerintahan Castro dengan Uni Soviet, mengingat jarak kedua negara sangat dekat, hanya berseberangan dari ujung wilayah Florida.

Ketika diberlakukan pada awal 1960an, sanksi Amerika Serikat pada awalnya ditujukan sebagai bentuk hukuman terhadap pemerintahan Castro yang melakukan pengambilalihan aset ekonomi Amerika Serikat di Kuba. Namun, justifikasi atas sanksi ini telah berubah seiring waktu berjalan selama Perang Dingin pembenaran sanksi ini diberikan kembali oleh Amerika Serikat untuk mengurangi petualangan militer Kuba.

Meskipun sanksi Amerika Serikat ini memiliki dampak buruk pada ekonomi Kuba yang telah kacau pada saat itu, manfaat politik yang mereka dapatkan sejak kepemimpinan politik Kuba telah jauh melebihi biaya ekonomi mereka. Selama hampir 30 tahun Kuba bertahan dengan ekonominya yang tertutup dimana sebagian besar kegiatan perekonomian Internasional bergantung kepada blok Soviet pada saat itu.

Pada tahun 1992, komunisme mulai terurai di seluruh dunia dan Kuba terguncang merasakan dampak buruk dari perngurangan subsidi Soviet dan

integrasi pasar – Undang Undang Demokrasi Kuba (atau Torricelli Act, yang dinamai menurut sponsor aslinya, Perwakilan di Kongres Amerika Serikat, Robert Torricelli) di setujui dengan maksud untuk melumpuhkan ekonomi Kuba dengan melarang perusahaan asal Amerika Serikat, termasuk dengan anak perusahaan lain yang berada di luar negeri, untuk terlibat dalam perdagangan dengan Kuba. Ironisnya, hal ini adalah kebalikan dari kebijakan yang diterapkan di Eropa Timur, yang berfungsi untuk mengikis kekuasaan komunisme di wilayah ini. Justifikasi untuk memberlakukan Torricelli Act bukanlah demi kepentingan keamanan nasional, namun sebagai bentuk hukuman terhadap pelanggaran HAM (Hak asasi manusia) yang dilakukan oleh pemerintah Kuba.

Kemudian pada tahun 1996, sementara Kuba dengan enggan untuk bereskperimen dengan liberalisasi pasar yang terbatas dan pemerintahan Clinton mengurangi sanksi terhadap Kuba dengan mengijinkan perjalanan wisata Amerika Serikat dengan jumlah yang lebih besar ke Kuba, Angkatan Udara Kuba menembak dua pesawat *Brothers to the Rescue* yang mengakibatkan tewasnya empat orang Amerika-Kuba. Sebagai tanggapan, Undang Undang (UU) Pembebasan dan Aksi Solidaritas Kuba tahun 1996 (atau Helms-Burton Act, yang dinamai menurut sponsor aslinya, Senator Jesse Helms, dan Perwakilan A.S (Amerika Serikat) Dan Burton) disahkan di Kongres A.S dengan dukungan bipartisan yang kuat.

Helms-Burton mengkodifikasikan kerngka sanksi yang membentuk embargo Kuba dan mengkondisikan penangguhan mereka atas pengakuan kongres terhadap pemerintahan transisi di Kuba, hal ini memberikan fokus yang jelas pada perubahan rezim sebagai elemen utama kebijakan A.S di bawah Helms Burton sebuah " Pemerintah transisi "di Kuba adalah salah satu, yang antara lain, melegalkan semua aktivitas politik, melepaskan semua tahanan politik, membuat komitmen publik untuk menyelenggarakan pemilihan multi partai secara bebas dan adil, membuat kemajuan nyata dalam membangun sebuah pengadilan yang independen, menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Pada tahun 2000, Kongres AS dan Presiden Clinton memodifikasi Helms-Burton dengan mengesahkan Undang-Undang (UU) Peningkatan Peningkatan Sanksi Perdagangan dan Peningkatan Ekspor, yang memungkinkan penjualan langsung komoditas pertanian tertentu, obat-obatan dan alat-alat medis ke Kuba, dan perjalanan yang terkait dengan transaksi semacam itu. UU tersebut mengatur perdagangan dengan ketat dalam kategori ini, melarang semua transaksi kredit atau debet atau pembiayaan oleh bank-bank Amerika, yang memaksa semua penjualan harus dibayar tunai terlebih dahulu atau didanai oleh lembaga keuangan negara ketiga. UU ini tidak mengendurkan larangan impor Kuba. Yang terburuk, UU ini melarang transaksi yang berkaitan dengan aktivitas wisata, yang secara efektif mengkodifikasi larangan perjalanan turis Amerika ke Kuba.

Di bawah Pemerintahan George W. Bush, pembenaran untuk sanksi A.S. selanjutnya disempurnakan untuk menolak sumber daya bagi pemerintah Kuba untuk memicu perubahan rezim, meskipun bersamaan dengan kerusakan jaminan kepada orang-orang Kuba. Pemerintahan Bush menggunakan otoritas perizinannya yang terbatas untuk menunda sebagian besar perjalanan "tujuan" atau "orang-orang ke-orang" dan sangat membatasi perjalanan keluarga dan pengiriman uang pada tahun 2004, karena seharusnya menanggapi penangkapan Kuba terhadap 75 pendukung demokrasi damai pada tahun 2003.

JAKARTA

NGUNANA

Pada tahun 2009, Pemerintahan Obama mengumumkan adanya pergeseran fokus kebijakan A.S. dari pemerintah Kuba dan untuk memberdayakan masyarakat sipil dan mendukung kegiatan ekonomi independen; Sejak itu dia telah menerapkan kewenangan perizinannya yang terbatas untuk memperluas perjalanan keluarga, "orang-ke-orang", pengiriman uang dan penyediaan layanan telekomunikasi. Pemerintahan Obama belum meminta Kongres untuk mencabut undang-undang Helms-Burton (atau ketentuan undang-undang terkait), yang tetap menjadi dasar kebijakan A.S., dan hambatan domestik terbesar untuk menanggapi perkembangan modern di Kuba dengan cerdas. Selama Helms-Burton tetap menjadi hukum tanah, fokus tunggal untuk menyakiti pemerintah Kuba akan terus melemahkan usaha untuk memberdayakan Kuba di dalam pulau itu.

Pentingnya membahas proses normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara ini, mulai dari proses awal mula terjadinya niat untuk menormalkan hingga terjadinya normalisasi ini bisa menjadi gambaran akan penyelesaian sebuah masalah diplomatik, terutama permasalahan yang telah berlangsung bertahun tahun, dapat diselesaikan secara damai, dan demi terbangunnya masa depan yang lebih baik masing masing kepala negara setuju untuk mengesampingkan perbedaan yang dimiliki, dan memilih untuk melanjutkan hidup dibandingkan terus menerus terjebak dalam memori permusuhan di masa lalu.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana proses normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba pada periode 2009-2016?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk memahami proses normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba dan untuk memahami proses serta penerapan normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba pada periode 2009-2016.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

- Manfaat Akademis dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi, pengetahuan dan data dalam jurusan Hubungan Internasional terutama dalam kajian yang terkait dengan permasalahan diplomasi, politik luar negeri Amerika Serikat, dan politik luar negeri Kuba serta terkait dengan permasalahan normalisasi hubungan diplomatik, khususnya normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba.
- Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana keberlangsungan proses dari normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba dan juga peran dari

aktor aktor yang terlibat dalam proses normalisasi hubungan diplomatik ini.

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat referensi referensi lain yang penulis manfaatkan di dalam proses penulisan. Referensi ini menjadi sumber tinjauan dari topik yang penulis teliti serta penulis proses dalam bentuk penulisan. Referensi ini membantu memberikan kontribusi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan.

Skripsi berjudul **Peran Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus Dalam Upaya Normalisasi Hubungan Amerika Serikat – Kuba** dari Chrispina Maria Gracia N, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015 ini membahas mengenai peran dari ketiga Paus dalam masa yang bergantian, Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus dalam upaya mereka sebagai *faith based diplomats* untuk membantu menormalkan hubungan negara Amerika Serikat dengan Kuba.

Awal mula peran dari Kepausan dalam permasalahan ini sendiri dimulai di masa Kepausan Paus Yohanes Paulus II disaat beliau berhasil menegosiasikan pembebasan sejumlah tahanan dari pemerintah Kuba.Pada masa Kepausan Paus Benediktus XVI, beliau mendorong agar pemerintah Kuba bisa bersikap lebih terbuka kepada dunia dan juga untuk pemerintah Kuba menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan yang dilakukan di dalam negara Kuba.

Selanjutnya, pada masa Paus Fransiskus beliau berhasil membantu menegosiasikan proses normalisasi dari hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba, bahkan Presiden Barack Obama serta Presiden Raul Castro pun setuju untuk mempercayakan proses normalisasi kepada diplomasi Paus Fransiskus. Di dalam skripsi ini juga dibahas mengenai penggunaan sebuah konsep yang dinamakan *Faith-based*

Diplomacy yang memiliki arti diplomasi berdasarkan keyakinan. Konsep ini dicetuskan oleh D. Johnston dalam bukunya yang berjudul Faith-Based Diplomacy: Trumping Realpolitic. Didalam skripsi ini juga dibahas mengenai apa pengaruh dari konsep faith-based diplomacy itu sendiri yang berjalan melalui faith-based diplomats, yaitu para Paus, kepada proses normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba ini.

Peran Paus dikaji dengan spesifik pada skripsi karya Chrispina ini, mulai dari masa Paus Yohanes Paulus II hingga masa Paus Fransiskus. Chrispina berargumentasi bahwa peran Paus dalam upaya normalisasi ini sangat konsisten, terutama dari aspek bagaimana para Paus rutin untuk mendekati pemimpin kedua negara secara personal dan terus mendorong bagi kedua negara untuk memperbaiki hubungan diantara mereka. Kunjungan kunjungan kenegaraan dan pendekatan intra-personal menjadi sarana yang digunakan oleh Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI, dan Paus Fransiskus dalam upaya mereka menegosiasikan dialog sebagai upaya awal dari normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba.

Namun, semuanya tidak lancar lancar saja karena terbukti beberapa kali hubungan antara Amerika Serikat dengan Kuba pada masa masa normalisasi ini sempat diwarnai ketegangan dan kebanyakan dari ketegangan itu dialami pada masa Kepausan Paus Yohanes Paulus II, dan Paus Benediktus XVI. Chrispina juga berargumentasi dalam apa pengaruh dari faith-based diplomacy yang dilakukan oleh para Paus kepada proses normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba.

Chrispina berargumentasi bahwa dalam *faith-based diplomacy* yang dilakukan membawa para Paus ke dalam celah sempit permasalahan antar kedua negara.Kharisma spiritual yang dibawa oleh masing masing Paus memberikan kemudahan dalam membangun komunikasi diantara keduanya, baik itu Paus kepada Amerika Serikat maupun Paus kepada

Kuba. Pada masa Paus Fransiskus, upaya normalisasi antar kedua negara mulai menemui hasil yang menjanjikan dimana diplomasi yang dilakukan oleh kedua negara mulai semakin intensif, dan pada akhirnya di bulan Desember tahun 2014, kedua kepala negara yaitu Presiden Barack Obama dan Presiden Raul Castro mengumumkan tercapainya kesepakatan normalisasi antar kedua negara.

Normalisasi Hubungan AS – Kuba Tahun 2013-2015 karya dari Kristian Thomas Djara, seorang mahasiswa dari Hubungan Internasional Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) ini, Kristian menulis spesifik tentang peran dari Paus Fransiskus dalam upayanya membantu menormalisasikan hubungan Amerika Serikat dengan Kuba. Kristian menulis hubungan Amerika Serikat dengan Kuba diwarnai oleh ketegangan selama 53 tahun semenjak era Perang Dingin, dan kedaulatan negara Kuba terancam oleh usaha demokratisasi oleh Amerika Serikat dengan embargo perdagangan dan ekonominya kepada Kuba.

Paus Fransiskus dapat menjembatani situasi yang penuh dengan ketegangan ini untuk berubah menjadi hubungan yang lebih kooperatif dengan diakomodirkan nya kepentingan dari masing masing negara. Diplomasi agama yang dijalankan oleh Paus Fransiskus, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara Katolik dan juga pemimpin umat Katolik, berdasarkan kepada *evangelii gaudium* yang merepresentasikan kepentingan Vatikan sebagai negara Katolik dunia.

Faktor agama menjadi penting dalam pembahasan permasalahan ini di skripsi yang ditulis oleh Kristian ini, dimana Kristian berpendapat fakto diplomasi agama, sang Paus Fransiskus sebagai diplomat agama, dasar dokumen agama *evangelii gaudium*, dan faktor agama yang dianut oleh Presiden Barack Obama serta kekagumannya terhadap sosok Paus Fransiskus sehingga Obama merestui agar Paus Fransiskus menjadi

mediator dalam penyelesaian permasalahan normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba.

Didalam skripsi ini juga dibahas mengenai kepentingan dari negara Vatikan terhadap normalisasi hubungan Amerika Serikat dengan Kuba. Pada bagian kepentingan Vatikan terhadap proses ini, Kristian menulis Vatikan adalah negara agama maka kepentingan yang ingin dicapai berlandaskan ajaran dan hukum keagamaan sehingga kepentingannya menjadi kepentingan universal untuk menciptakan kebaikan bersama (bonum commune).

Dalam konflik yang sebelumnya terjadi antara Amerika Serikat dengan Kuba terjadi permasalahan kemanusiaan di Kuba dimana masalah kemiskinan dan pangan di Kuba terjadi akibat embargo oleh Amerika Serikat di masa lalu. Paus Fransiskus memiliki tanggung jawab moral sebagai pemimpin keagamaan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Kristian juga lebih menekankan pada pembahasan mengenai aturan dasar kegamaan yang mendorong Paus Fransiskus turut membantu menyelesaikan permasalahan ini, dokumen ataupun konsep dasar keagamaannya antara lain *evangelii gaudium*, dokumen Konsili Vatikan II *populorum progetio*, dan pendidikan religius dalam ordo Jesuit yang berada dibawa otoritas Vatikan yang membentuk dasar pemikiran agama yang kuat. Dalam *evangelii gaudium* Paus Fransiskus menekankan adanya upaya untuk segera mungkin menyelesaikan masalah kemiskinan dan hal ini adalah perihal permasalahan yang tidak boleh ditunda tunda.

Dalam dokumen *evangelii gaudium* ini juga disebutkan ketimpangan merupakan akar dari segala permasalahan, bila ketimpangan dan kemiskinan tidak secepatnya diselesaikan maka masalah masalah lain diseluruh dunia tidak akan bisa terselesaikan juga. Pada dasarnya, gagasan

dokumen *Evangelii Gaudium* ini berdasarkan kepada kerangka norma kemiskinan yang memberikan dampak dalam permasalahan ini, yaitu, salah satunya tingkat pengangguran di Kuba berkurang semenjak Paus Fransiskus menjadi pemimpin di Vatikan.

Dalam jurnal berjudul Amnesty International, The US Embargo Against Cuba: It's Impact on Economic and Social Rights terbitan dari Amnesty International ini menulis tentang, selama hampir setengah abad, Amerika Serikat telah secara sepihak memberlakukan embargo ekonomi, komersial, dan keuangan terhadap Kuba. Tingkat keparahan dan lingkup sanksi bervariasi, tergantung pada perkembangan politik di Kuba, Amerika Serikat dan seluruh dunia. Pengenaan terus menerus embargo telah menimbulkan perdebatan sering dan intens dalam forum-forum internasional.

Majelis Umum PBB telah berulang kali mengutuk embargo AS karena bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Tanggal 29 Oktober 2008, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi reiterating untuk ke-17 kalinya panggilan pada Amerika Serikat untuk mengakhiri embargo terhadap resolusi Kuba. Resolusi tersebut diadopsi dengan 185 suara mendukung, tiga menentang dan dua abstain.Komisi Inter-Amerika untuk Hak Asasi Manusia juga telah menegaskan posisinya mengenai dampak sanksi tersebut pada hak asasi manusia rakyat Kuba dan, karena itu, menegaskan bahwa embargo harus dicabut.Masyarakat internasional telah mengecam embargo karena melanggar hukum internasional, dan atas dasar moral, politik dan ekonomi.

Sejak Barack Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan Januari 2009, telah terjadi perdebatan sengit dan banyak panggilan di tingkat nasional dan internasional untuk mengangkat embargo AS terhadap Kuba. Sayangnya, dalam perdebatan ini hampir tidak ada yang menyebut dampak negatif dari embargo pada hak asasi manusia Kuba.

Dokumen ini menegaskan sebelumnya rekomendasi Amnesty International menyerukan pencabutan embargo AS terhadap Kuba. Amnesty International belum mampu mendokumentasikan efek langsung dari embargo pada pemenuhan hak-hak tersebut karena kurangnya akses informasi secara langsung di Kuba. Dalam laporan ini, didasarkan sebagian besar laporan dari badan-badan PBB dan program operasi di Kuba, termasuk dalam laporan Sekretaris Jenderal PBB yang telah disampaikan kepada Majelis Umum PBB secara tahunan sejak tahun 1994.

Laporan tentang situasi hak asasi manusia di Kuba dari sumber PBB lainnya, Komisi Inter-Amerika tentang Hak Asasi manusia, badanbadan pembangunan yang bekerja di Kuba dan organisasi hak asasi manusia yang juga telah dipertimbangkan untuk menilai dampak embargo pada hak-hak ekonomi dan sosial dari Kuba. Pengenaan embargo tidak membebaskan pemerintah Kuba dari kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia semua orang Kuba.

Sementara embargo mempengaruhi kapasitas pemerintah Kuba untuk semakin menyadari bahwa beberapa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, pemerintah harus memberikan perlindungan terbesar dari hak-hak tersebut sejauh sumber daya yang tersedia memungkinkan.Dalam melakukannya, tidak harus melakukan diskriminasi atas dasar apapun dan itu harus memprioritaskan anggota masyarakat yang paling rentan.Undang-undang embargo berisi ketentuan untuk "membangun demokrasi" di Kuba yang meliputi alokasi jumlah yang signifikan dari bantuan dan dukungan untuk LSM Kuba dan individu yang menentang pemerintah.

Penguatan embargo dengan Undang-Undang Helms-Burton pada tahun 1996 diminta bagi pihak berwenang di Kuba untuk merespon dengan undang-undang yang keras yang akhirnya telah digunakan untuk menghukum tahanan tanpa pertimbangan hati nurani untuk masa penjara yang lama. Pihak berwenang Kuba menggambarkan pembangkang politik non-kekerasan dan aktivis hak asasi manusia sebagai simpatisan asing

yang mendukung kebijakan AS terhadap Kuba.Embargo telah membantu merusak masyarakat Kuba untuk menikmati hak-hak sipil dan politik di Kuba, dengan memicu iklim di mana hak-hak dasar seperti kebebasan berserikat, berekspresi dan berkumpul secara rutin dilarang.

Meskipun pemerintah Kuba bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia di Kuba, telah tumbuh pengakuan internasional bahwa dalam menjatuhkan sanksi, seperti embargo perdagangan, negara harus memperhitungkan efek bahwa sanksi tersebut terhadap proses ekonomi , sosial dan budaya di negara yang terkena dampak. Amnesty International percaya bahwa dampak embargo pada hak asasi manusia Kuba telah menerima perhatian yang cukup dari pemerintah AS.

Tidak ada mekanisme formal dalam pemerintah AS untuk memantau dampak embargo pada hak-hak ekonomi dan sosial di Kuba. Setiap tahun sejak 1999, Departemen Luar Negeri AS telah menerbitkan laporan tentang situasi hak asasi manusia di sebagian besar negara. Laporan-laporan ini sebagian besar terbatas pada, hak-hak politik dan tenaga kerja sipil diakui di bawah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tetapi tidak untuk memantau pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Kuba - juga diakui di bawah UDHR dan sejumlah instrumen hak asasi manusia lainnya - dan dampak embargo AS memiliki realisasi mereka.

I.6 Kerangka Pemikiran

Dalam proses pembuatan dan penyelesaian penelitian, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang penulis teliti dalam penulisan penelitian ini. Teori Diplomasi, Konsep Normalisasi, dan Konsep *Multi Track Diplomacy* merupakan teori dan konsep yang digunakan dalam membahas dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.

I.6.1. Teori Diplomasi (Multi Track Diplomacy)

Diplomasi modern merupakan diplomasi yang berkembang sebelum Perang Dunia I atau setelah perjanjian Westphalia yang diwarnani dengan penghapusan perjanjian rahasia.Dan terdapat faktor yang berpengaruh dalam diplomasi modern yakni salah satunya ialah kemajuan dalam teknologi (Roy, 1991).

Diplomasi modern juga menghasilkan suatu kesepakatan atau perjanjian tertulis yang menunjukkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk mengakhiri konflik atau perang. Terdapat beberapa karakteristik diplomasi modern yakni pertama, diplomasi modern bersifat lebih terbuka pada publik sehingga meminimalisir kecurigaan atau prasangka buruk.

NGUNANA

Kedua, dengan diubahnya diplomasi tradisional menjadi diplomasi modern atau dikenal sebagai *second-track* diplomasi, secara otomatis membuat proses diplomasi menjadi aktivitas yang lebih rumit dan bervariasi. Karena tidak hanya melibatkan peran pemerintah dalam menjalankan misi diplomasi, tetapi juga melibatkan lebih dari satu aktor, yaitu Inter-governmental Organization, Non-Governmental Organization, MNC dan individu. Ketiga, diplomasi modern ini tidak hanya memiliki agenda yang berkenaan dengan *high politics*, melainkan memiliki agenda yang bersifat *low politics*.

Seperti contoh masalah ekonomi, sosial dan isu kesejahteraan dimana cara yang dipakai dalam diplomasi modern ini ialah preventif terutama dalam pencegahan peperangan. Dalam diplomasi modern ini, tidak hanya hubungan bilateral saja yang dilakukan akan tetapi juga hubungan multilateral yang terdiri dari beberapa kelompok negara (Baylis&Smith, 1998).

Diplomasi modern sendiri mulai berkembang sejak abad 21 dimana isu-isu yang berkembang bersifat universal secara alami seperti hak asasi manusia, pengawasan internasional terhadap penyakit, arus modal dan informasi internasional, hak-hak buruh, perdagangan, isu lingkungan

nasional dengan perdebatan internasional, serta isu lingkungan yang bersifat alamiah secara internasional.

Oleh karena diplomasi modern menerapkan hubungan multilateral, isuisu inilah yang kemudian menjadi kajian pada setiap badan untuk berdiplomasi.Munculnya kepentingan nasional negara yang semakin berkembang pula yang menuntut suatu negara untuk lebih terbuka dalam melihat isu-isu baru yang lebih spesifik yang berkembang di internasional.

Multi-Track Diplomacy adalah 9 perangkat jalur (track) yang berfungsi sebagai alat bantu sebuah negara dalam menjalankan praktik diplomasinya (Diamond & McDonald, 1996). Jalur pertama adalah diplomasi melalui pemerintah. Jalur ini dianggap sebagai jalur diplomasi yang paling dapat diandalkan karena pemerintah memiliki wewenang dan sebuah kapabilitas yang resmi dalam menjalankan praktek diplomasi (Diamond, dan McDonald, 1996). Jalur kedua adalah diplomasi melalui organisasi non pemerintah karena ada isu-isu dalam diplomasi yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sebuah pemerintahan namun juga membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya (Diamond & McDonald, 1996). Kelebihan dari jalur ini adalah isu yang dibahas dapat dibawa ke level nasional maupun internasional secara lebih terbuka. Kekurangan nya adalah organisasi non pemerintah tidak memiliki legitimasi sebesar sebuah pemerintahan yang berdaulat.

Jalur ketiga adalah jalur diplomasi melalui bisnis.Jalur ini menggunakan kekuatan ekonomi sebagai alat berdiplomasi seperti dengan perusahaan multi-nasional hingga perusahaan kecil (Diamond & McDonald, 1996). Jalur keempat adalah diplomasi melalui warga sipil, jalur ini memungkinkan seseorang untuk menjadi agen diplomasi yang berperan dalam kegiatan diplomasi ataupun memberikan pandangannya yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan diplomasi.

Jalur kelima melalui jalur diplomasi penelitian dan pendidikan. Diplomasi di jalur ini bisa dilakukan dengan cara pertukaran pelajar, studi kultur, studi damai, studi resolusi konflik, pelatihan, acara pendidikan, dan penelitian bersama oleh banyak negara (Diamond & McDonald, 1996). Jalur keenam adalah melalui kegiatan kegiatan aktivisme layaknya seperti yang dilakukan oleh organisasi seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan Peace Action.

Jalur ketujuh adalah diplomasi melalui jalur agama.Karena agama merupakan suatu hal yang bersifat universal maka penerapannya bisa melewati atau menjadi lintas batas negara sebagai bentuk usaha untuk perdamaian dunia.Jalur kedelapan adalah diplomasi dengan pendanaan yang dilakukan oleh dua jenis kelompok (Diamond & McDonald, 1996).

Kelompok pertama adalah kelompok yang berfokus pada pendanaan yang bersifat akademis, sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang pendanaannya bersifat grassroots. Jalur terakhir yaitu jalur kesembilan adalah melalui media komunikasi. Media komunikasi merupakan alat yang sangat efektif untuk membentuk opini public yang dapat melintasi batas batas negara yang ada. Diplomasi ini erat kaitannya dengan kedelapan diplomasi yang lain karena jalur lain membutuhkan peranan dari media komunikasi untuk berkomunikasi dengan publik.

Keuntungan dari diplomasi seperti ini adalah jangakauannya yang luas serta penyebarannya yang bisa sangat cepat dan masif, namun di sisi lain ada kekurangannya yaitu karena media komunikasi dimiliki oleh perusahaan, maka ditakutkan dapat terjadi kontrol muatan informasi itu oleh perusahaan media itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Teori Diplomasi, lebih khususnya Teori Diplomasi Modern dan *Multi Track Diplomacy*, akan menjadi penjelas pada bagian pembahasan bagaimana proses normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba bisa terjadi.

Melalui teori ini juga akan dijelaskan bagaimana peran *non-state actor* dapat mempengaruhi keputusan diplomatik bagi hubungan luar negeri suatu negara, dalam penelitian ini khususnya adalah peran Paus Francis

yang turut membantu membuka kembali hubungan diplomatik beserta proses normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba, dan arena *Multi Track Diplomacy* masih merupakan bagian daripada Teori Diplomasi maka penggunaan *Multi Track Diplomacy* ada pada jalur diplomasi pertama, keempat, dan ketujuh.

Pada ketiga jalur diplomasi tersebut dapat membantu menjelaskan bentuk bentuk diplomasi yang terjadi selama proses mencairnya kembali hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba, baik hal tersebut dari sisi masing masing pemerintahan, serta peran Paus Francis dalam proses normalisasi ini.

I.6.2 Konsep Hubungan Bilateral

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di era globalisasi seperti ini dimana hampir tidak mungkin bagi sebuah negara untuk tidak menjalin komunikasi atau interaksi dengan negara lainnya. Interaksi antar bangsa sebagai bagian dari Hubungan Internasional dapat terjadi melalui beberapa bentuk seperti hubungan yang bersidat bilateral, regional, ataupun multilateral.

Budiono Kusumohamidjojo mengartikan hubungan bilateral itu adalah "suatu bentuk kerjasama yang berada diantara negara negara yang jaraknya berdekatan baik secara geografisnya maupun yang posisi negaranya berada jauh di seberang lautan, dengan sasaran utamanya untuk dapat menciptakan sebuah perdamaian dengan memperhatikan unsure kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi". (Kusumohamidjojo, 1987, hlm 3).

Terjadinya hubungan bilateral juga tidak dapat dilepaskan dari tercapainya kesepahaman antar kedua negara yang mereka melakukan hubungan karena mengabdi pada kepentingan nasionalnya masing masing negara dalam usaha untuk menjalankan politik luar negerinya masing masing. Kepentingan nasional suatu negara dapat merefleksikan tujuan

nasional yang ingin dicapai dari bangsa tersebut, Plano dan Olton berpendapat:

"Hubungan kerjasama yang terjadi diantara dua negara secara dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan nasional suatu negara itu sendiri.Kepentingan nasional merupakan sebuah unsur yang sangat vital/penting dalam mencakup kelangsungan hidup berbangsa, bernegara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. (Plano, 1990, hlm 7)

Di dalam kamus politik internasional, konsep tentang hubungan bilateral adalah "hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)".(Krisna 1993, hlm 18). Hubungan bilateral terjadi karena sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan dari negara lain, layaknya diri seorang manusia. Sebuah negara akan selalu saling membutuhkan dan negara tidak menjaga **eks**istensinya di dunia ini dapat bila tidak berinteraksi/berhubungan dengan negara negara lain di dunia.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep hubungan bilateral ini sebagai penjelas dan pembahas dalam interaksi politik antara Amerika Serikat dan Kuba. Karena Amerika Serikat dan Kuba merupakan dua negara yang melakukan interaksi interaksi politik luar negeri, maka variabel bi dalam bilateral yang berarti dua dan variabel lateral yang dapat diartikan juga sebagai negara telah terpenuhi. Kedua negara tersebut melakukan gesture diplomasi seperti perundingan, pertemuan hingga langkah langkah diplomatik lainnya untuk menormalkan hubungan diplomatik mereka, hal ini menjadi jelas bahwa dalam penelitian ini Amerika Serikat dan Kuba melakukan konsep dari Hubungan Bilateral itu sendiri.

I.6.3 Konsep Normalisasi

R.P Barston dalam bukunya yang berjudul *Modern Diplomacy* mendefinisikan normalisasi sebagai proses dari pemulihan hubungan diplomatik. Normalisasi itu sendiri bermula ketika salah satu atau kedua pihak menyadari perlunya bagi mereka untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka, selanjutnya dilanjutkan dengan pencarian dari jalan keluar bagi permasalahan dalam permasalahan mereka demi kelanjutan hubungan di masa depan yang lebih baik. Menurut Barston salah satu cara untuk bisa mencari jalan keluar dari permasalahan adalah dengan mengeliminasi seluruh atau sebagian dari faktor utama permasalahan yang menghalangi kedua negara untuk berhubungan dengan baik.

Ada 10 tahapan normalisasi dalam prosesnya menurut Barston, yaitu:

- a. Dibangunnya kembali hubungan, baik melalui jalur formal maupun informal.
- b. Dilakukannya bentuk pertukaran informal, seperti gencatan senjata dan/atau pertukaran tawanan.
- c. Melakukan hubungan informal secara tersembunyi dan dibangunnya hubungan diplomatik secara terbatas, hal ini disebut *low level signaling*.
- d. Dibukanya kembali hubungan perdagangan maupun bank secara terbatas.
- e. Jalur negosiasi yang dibuka melalui mediasi dari pihak ketiga, baik secara langsung maupun rahasia.
- f. Dihapuskannya hambatan perdagangan dan embargo.
- g. *Revisions of policy*, yaitu revisi dari kebijakan yang terkait dengan proses dari normalisasi.
- h. Negosiasi dalam isu isu utama dari normalisasi
- Dibuatnya kesepakatan dalam normalisasi dan pembangunan kembali dari hubungan diplomatik.
- j. Implementasi dari normalisasi.

Dari kesepuluh tahapan normalisasi yang disebutkan oleh Barston dapat terlihat relevansinya dalam proses normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba, dimana pihak Amerika Serikat dan Kuba melakukan pertemuan pertemuan rahasia, adanya gestur diplomatik yang menandakan bentuk hubungan informal, pembangunan hubungan yang bersifat formal dan diaplikasikannya berbagai kebijakan sebagai implementasi nyata dari niatan baik normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara yang dulunya bersitegang selama lebih dari 5 dasawarsa ini yang akhirnya pada saat ini dapat menormalkan hbungan diplomatiknya.

Ketidak Normalan dalam Hubungan Diplomatik Amrika Serikat dengan Kuba Proses Menuju Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba Terjadinya Normalisasi dalam Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba

I.8 Asumsi

- 1. Normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba dibantu oleh Paus Fransiskus beserta aktor negara yaitu Amerika Serikat dan Kuba beserta Kanada.
- 2. Proses normalisasi beserta implementasinya memberikan sejarah baru pada hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Kuba.

I.9. Metode Penelitian

I.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang bersifat kualitatif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena perihal pengalaman yang dialami oleh subjek dari penelitian tersebut, misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan persepsi, dan hal tersebut dianalisis secara keseluruhan dan dengan cara pendeskripsiannya yang dibentuk dalam kata kata dan bahasa. (Moleong: 2010) Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dari buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A., metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian tentang proses normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba ini dilakukan dengan cara mengembangkan bahan serta dokumen dokumen yang berfokus kepada proses normalisasi dan peran aktor aktor dalam proses normalisasi hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut.

I.9.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, penulis berupaya menjelaskan mengenai permasalahan yang penulis teliti. Penulis mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan ada atau tidaknya indikator permasalahan yang penulis teliti, dalam hal ini penulis melihat adanya ketidaknormalan dalam hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba dan mulai dari tahun 2009 penulis melihat adanya upaya yang dilakukan oleh kedua negara dengan bantuan aktor penting lain dalam proses normalisasi hubungan diplomatik kedua negara tersebut hingga akhir tahun 2014, dan dilanjutkan mengenai normalisasinya di tahun 2015.

I.9.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dapat mendukung pencarian jawaban atas permasalahan yang penulis angkat dalam topik penelitian dan secara keilmuan dapat dibuktikan kebenarannya.Sumber data berupa wawancara serta pencarian data langsung kepada pihak yang terkait dengan permasalahan sebagai sumber data primer, seperti perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, Kedutaan Besar Kuba, dan Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Sumber data berupa pustaka atau buku, publikasi, artikel, jurnal, laporan tertulis, majalah, berita *online*, dan dokumen dokumen lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti sebagai sumber data sekunder.

I.9.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dalam menganalisa permasalahan yang diteliti melalui teknik pengumpulan data wawancara dan telaah pustaka (*library research*). Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada pihak dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kedutaan Besar Kuba. Teknik pengumpulan data melalui telaah pustaka (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dokumen terkait proses normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat, dengan menitik beratkannya kepada berita *online* mengenai normalisasi hubungan diplomatik kedua negara serta peran dari aktor terkait dan juga dokumen dari Pemerintah Amerika Serikat mengenai pengumuman yang terkait dampak dari normalisasi hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu, analisis dari data yang sudah dikumpulkan dilakukan guna membuktikan hipotesa yang telah dibuktikan oleh teori dan konsep yang dipergunakan.

I.9.5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif, dimana penulis menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan yang penulis teliti dan penulis memfokuskan kepada sumber sumber data yang bersifat kualitatif juga sehingga penulis bisa benar benar memahami duduk permasalahan dari penelitian yang penulis teliti dan akhirnya bisa mengaitkan permasalahan tersebut dengan sajian teori dan konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Sebagai contohnya dalam proses normalisasi hubungan

diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba ini penulis meneliti tentang proses diplomasi dari awal hingga tercapainya normalisasi tersebut.

I.10. Sistematika Pembabakan

BAB I : Pendahuluan

Bagian pertama ini berisikan pengantar kepada permasalahan yang akan diteliti seperti pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Proses Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba

Membahas tentang sejarah putusnya hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba, dan awal mula dari proses Normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Kuba.

BAB III : Penerapan Normalisasi Hubungan Diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba

Membahas lebih dalam mengenai penerapan normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dengan Kuba, dan bagaimana peran aktor yang ada dalam proses serta adanya tantangan yang dihadapi dalam normalisasi ini.

BAB IV : Penutup

Berisi penutup dari penelitian ini. Bab penutup ini berisikan

kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi ataupun tanggapan terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

